



Judul : Nih, Awasi Tahapan Krusial Pemilu 2024
Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Nih, Awasi Tahapan Krusial Pemilu 2024!

ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Herwyn JH Malonda mengatakan, Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada 14 Februari sama dengan pemilu 2019. Dia menjelaskan, hal-hal krusial dalam tahapan Pemilu 2024 yang perlu diwaspadai.

Pertama, terkait data pemilih yang berpotensi digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia meminta publik mengawasi pemilih dalam DPT (daftar pemilih tetap) yang tak lama lagi akan ditetapkan. Kata dia, salah satu gugatan paling banyak di MK itu dari daftar pemilih.

"Karena itu, Bawaslu mengutamakan upaya pencegahan agar masyarakat mau terlibat mengecek sebagai DPT," ungkapnya.

Herwyn menuturkan, hal krusial kedua yakni pencalonan sebagai tahapan yang berpotensi besar akan menimbulkan masalah. Pada 3 November 2023, lanjutnya, KPU bakal mengumumkan DCS (daftar calon sementara) untuk DPR tingkat pusat, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

"Perlu bersama-sama mengecek para calon yang mungkin belum memenuhi syarat. Misalnya yang tak memenuhi syarat itu belum berumur 21 tahun atau mantan terpidana yang belum melewati masa jeda lima tahun," ungkapnya.

Ketiga, mengenai logistik. Herwyn mengakui, bisa saja surat suara melebihi jumlah pemilih. Hal ini mengingat ketentuan surat

suara adalah jumlah DPT ditambah 2 persen dari DPT di tiap TPS. Baginya, perlu memastikan surat suara digunakan sebagai mestinya.

"Tahapan krusial lainnya yakni soal kampanye. Pada November 2023 calon presiden dan wakil presiden ditetapkan. Sedangkan kampanye sendiri yang dimulai 28 November sampai 10 Februari 2024 yang lebih singkat daripada pemilu sebelumnya," ungkapnya.

Herwyn mengatakan, masa kampanye biasanya paling banyak masalah. Seperti penyebaran berita bohong (hoaks), kampanye hitam, politik uang, dan berbagai masalah lainnya yang perlu diwaspadai. Dia mengatakan, dalam undang-undang

diperlukan pengawasan pemilu sehingga dibentuk Bawaslu.

"Secara substansi pemilih pemilu adalah rakyat. Karena itu, Bawaslu saat ini mengutamakan upaya pencegahan. Bawaslu tidak bisa melakukan pengawasan sendiri, karena itu perlu melibatkan pengawasan partisipatif dari masyarakat yang telah dibuat dalam berbagai program," tukasnya.

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia menegaskan, perlunya membangun kesadaran dan segenap pihak terlibat dalam melakukan pengawasan tahapan pemilu. Dia pun menegaskan perlunya rasa soliditas dan sinergitas antar lembaga penyelenggara pemilu. ■ ASI